

**IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG ANAK NEGERI KOTA
SURABAYA**

(Studi Pada UPTD Kampung Anak Wonorejo)

Anisah Puteri Djatmiko

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
anisahputeridj@gmail.com;

Yusuf Hariyoko

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
yusufhariyoko@untag-sby.ac.id;

Adi Soesiantoro

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
adi_susiantoro@untag-sby.ac.id;

ABSTRACT

The Surabaya city government cares about the welfare of street children. In 2009 the Surabaya City Public Children's Village program was designed by the Social Service and then 3 UPTD offices were formed which included the UPTD Kampung, Kalijudan State Children's Village UPTD, Griya Werdha Home. Government communication with the perpetrators who are responsible for screening Street Children who live in the city of Surabaya. The role of the community in reducing the number of street children directly reduces poverty for the families to be accommodated. This study aims to look at the implementation of the State Children's Village Program at UPTD Wonorejo State Children's Village. The research method that the writer uses is descriptive qualitative research. And the successful implementation of the Surabaya City State Children's Village program was analyzed by the author using 4 indicators derived from Edward III's theory. 4 indicators which include Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic structure. The results of the research analysis revealed that all assisted residents at UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo carry out coaching activities and activities to increase interest in talent. The emergence of problems with street children makes the authors provide suggestions for improvements to the personality of street children for the better. Abstract is the essence of the article content. It contains the summary of the whole text without taking too much detail on each part of the text. Avoid writing any acronym except it is widely known or has been stated before.

Keywords: *Implementation, Program Kampung Anak Negeri, Theory Edward III*

A. PENDAHULUAN

Kondisi kemiskinan yang dialami Indonesia membawa pengaruh cukup besar terhadap permasalahan sosial yang dihadapi. Kehidupan yang didesak ekonomi rendah serta keterbatasan kurang pengetahuan dan pengalaman kerja yang menyebabkan kelompok masyarakat mencari sumber penghasilan dengan bekerja di jalanan. Memilah bekerja di lapangan jalanan adalah selain tidak memerlukan syarat dan kemampuan khusus, pekerja jalanan seperti pengemis, pengamen, dan penjual koran paling banyak menghabiskan waktunya di jalanan sehingga seringkali disebut sebagai anak jalanan. Berdasarkan penjelasan beberapa ahli tentang definisi anak jalanan, dapat dinyatakan bahwa anak jalanan ialah anak dengan rentan usia 5 sampai 18 tahun yang tinggal ataupun bekerja dan bertempat tinggal bebas di jalanan.

Table 1.1 Data Anak Jalanan di Indonesia

No.	Tahun	Jumlah anak Jalanan
1.	2020	206
2.	2021	285
3.	2022	285

Fenomena anak terlantar atau anak yang ditinggal bebas di jalanan menjadi salah satu permasalahan sosial yang dihadapi oleh suatu negara. Namun sampai saat ini dijumpai anak yang bebas tinggal di jalanan dan berkeliaran di kota-kota besar terutama di tempat umum seperti pasar, taman, terminal, penempatan lampu merah dan berbagai fasilitas umum lainnya. Diantaranya kelompok anak jalanan banyak yang berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi rendah sehingga memaksa mereka untuk mengadu di dunia kerja jalanan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya atau bahkan justru bermula dari kemauan sendiri tinggal di jalanan karena terpengaruh kenakalan remaja. Selain itu, masih banyak ditemui anak jalanan yang merupakan korban dari akibat ketidakharmonisan keluarga sehingga mereka memilih untuk tinggal di jalanan. Hal ini dikarenakan problematika keluarga membawa pengaruh yang cukup besar terhadap kondisi anak.

Laporan World Health Organization (WHO) yang dikutip dalam jurnal (Khosravi et al., 2018) terdapat sekitar 100 juta anak di Dunia teridentifikasi menjadi anak bebas tinggal di jalanan juga menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan. Merujuk pada jurnal yang dikemukakan oleh (Eni Purwanti, 2022) Sedangkan 20% lainnya merupakan anak yang berasal dari luar kota tersebut. Dengan adanya pernyataan ini, maka dapat diketahui bahwa beberapa anak jalanan merupakan anak yang melarikan diri dari rumah atau melakukan imigrasi dan bekerja di kota tujuannya.

Kota Surabaya menjadi salah satu kota yang mengalami peningkatan akan populasi anak jalanan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 menunjukkan bahwa masih terdapat 59 anak jalanan

surabaya (Badan Pusat Statistik, 2009). Angka populasi anak jalanan yang telah disebutkan dapat meningkat sewaktu-waktu mengingat banyak anak jalanan yang tidak terdata BPS. Merujuk pada penelitian (Millenia Prihatini, 2019) setiap anak jalanan memiliki konsep diri yang berbeda satu sama lain tergantung dari latar belakang kehidupan mereka.

Seiring dengan banyaknya jumlah anak jalanan di Kota Surabaya, diikuti juga dengan meningkatnya tindak kriminalitas pada anak jalanan. Banyak diantara mereka yang pada akhirnya terjerat kasus kenakalan remaja seperti mencuri, tawuran, ataupun merokok dan minum-minuman keras. Tidak hanya melakukan kejahatan, kelompok anak jalanan juga sangat rawan menjadi pekerja paksa tanpa upah. Hal ini didasarkan pada stigma negatif yang identik dengan anak jalanan berdasarkan pada karakteristiknya dan model penanganan yang berbeda (Millenia Prihatini, 2019) aspek demografis, turut mempengaruhi untuk seseorang berkemungkinan melakukan tindak kekerasan. Hal ini sejalan dengan teori lifestyle Exposure yang dikemukakan oleh Hindelang, Gottfredson dan gorofalo dalam (Khosravi et al., 2018).

Kondisi anak jalanan yang hidup bebas di jalanan sangat rawan terhadap tindak kriminalitas dikarenakan tidak adanya pengawasan khusus dari keluarga dan lingkungannya. Kondisi ditambah parah karena minimnya dukungan sosial kepada anak jalanan sehingga beresiko mendapatkan semena-mena. Salahsatu validitas yang menjadi sumber dukungan yang cukup mempengaruhi anak jalanan ialah dukungan dari pemerintah daerah setempat. Berdasarkan penelitian (Millenia Prihatini, 2019) sampai dengan saat ini kondisi anak di Indonesia ternyata masih terancam kehidupannya. Sampai saat ini, masih ditemukan banyak kasus kekerasan pada anak yang terjadi di kota Surabaya termasuk diantaranya adalah anak jalanan. Hal inilah yang menjadikan Surabaya mendapat predikat sebagai salah satu kota dengan kasus kekuasaan pada anak terbanyak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Kota Surabaya menempati peringkat ketiga dengan presentase penemuan kasus kekerasan terhadap anak tertinggi yakni sebesar 27% dibanding dengan daerah lain di Jawa Timur. Banyaknya temuan kasus tersebut akan disajikan pada tabel berikut ini.

Table 1.2 Angka Kasus kekerasan Anak di Jawa Timur

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus
1.	Jember	110
2.	Sidoarjo	67
3.	Surabaya	55
4.	Probolinggo	37
5.	Malang	29

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data tersebut, jumlah kasus kekerasan pada anak di Kota Surabaya masih sangat tinggi dan didominasi oleh kekerasan seksual, kekerasan

fisik tindak kriminal maupun anak terjerat kasus hukum. Jumlah ini diperparah dengan masih banyaknya peningkatan anak hidup berkeliaran dan hidup bebas di jalanan. Hal inilah yang melatarbelakangi pemerintah Kota Surabaya untuk menjadikan anak jalanan sebagai salah satu sasaran program penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)(Cahyadi et al., 2021). Di Indonesia masih dijumpai masalah terkait PMKS, berdasarkan rekapitulasi data kementerian sosial mengenai PMKS terdapat tiga provinsi yang memiliki permasalahan yang paling besar yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (Cahyadi et al., 2021) . Melihat kondisi ini pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk mengurangi jumlah anak jalanan sebagai salah satu wujud pembangunan daerah melalui kualitas Sumber Daya Manusia mengingat bahwa kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia masih dalam kondisi yang belum cukup memadai (Winardi Wahyudi 2018). Dalam memperbaiki kualitas SDM, maka pemerintah berupaya menangani permasalahan PMKS yang didaerahnya terlebih dahulu masalah terkait PMKS di Surabaya sendiri diatur dalam keputusan walikota nomor 188.45/315/436.1.2/2011.

Dikelola secara langsung oleh UPTD Dinas Sosial kota Surabaya, program di Kampung Anak Negeri menjadi salah satu upaya pemerintah kota Surabaya untuk penanganan masalah anak jalanan melalui rumah binaan. Terciptanya program Kampung Anak Negeri sejak tahun 2009 dilatarbelakangi dengan diturunkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor: 467/436.6.15/2009 terkait pembentukan UPTD Pondok Sosial Anak Wonorejo, kemudian terbit kebijakan tentang pembentukan UPTD kampung anak Negeri Surabaya yang termuat dalam peraturan walikota Nomor 61 tahun 2012. Program kampung anak negeri juga mengacu pada Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 yang membahas tentang perlindungan anak.

UPTD Kampung Anak Negeri beralamatkan di jalan wonorejo timur Nomor 130, wonorejo, kecamatan Rungkut, kota Surabaya, Jawa Timur. Luas lahan 40 x 50 yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang kebutuhan anak binaan. Saat ini UPTD kampung anak negeri sendiri dihuni sekitar 35 anak yang semuanya berjenis kelamin laki – laki dengan rentan usia 8 sampai dengan 18 tahun (Silvia Ayu Ariyanti, 2019). Kelompok anak binaan rerata memilih latar belakang problematika keluarga, pengguna obat-obat terlarang yang merupakan bentuk kenakalan remaja. Selama tinggal di UPTD kampung Anak Negeri seluruh anak binaan mendapatkan berbagai macam kegiatan pembinaan sesuai dengan yang telah disediakan oleh pihak UPTD baik dalam bentuk pendidikan formal maupun berbagai pelatihan dan pembinaan. Adanya pendidikan dan pelatihan ini sebagai bentuk pemenuhan hak dan kebutuhan anak jalanan yang selama ini belum mereka dapatkan (Silvia Ayu Ariyanti, 2019).

Oleh Karena itu, program Kampung Anak Negeri ciptaan pemerintah Kota Surabaya mengupayakan kesejahteraan anak melalui perbaikan kualitas pendidikan anak terutama bagi anak jalanan yang mengalami keterbatasan untuk melanjutkan ke sekolah. Hal ini juga dilatarbelakangi juga dengan harapan Kota Surabaya untuk mewujudkan pembangunan daerahnya karena salah satu faktor bentuk keberhasilan pembangunan suatu daerah tergantung pada kualitas sumber

daya manusianya.

Harapan tersebut lambat laun terwujud dengan menurunnya populasi karena upaya penanganan anak jalanan kota Surabaya yang melibatkan beberapa instansi seperti Dinas Tenaga Kerja, BAPEMNAS, SATPOL PP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, kecamatan dan kelurahan. Tidak jarang lembaga ini melibatkan pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaannya, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Save the Children, Rumah Transisi, Lembaga Pendidikan, UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Kampung Anak Negeri.

Setelah didirikannya program Kampung Anak Negeri, jumlah PMKS anak-anak termasuk anak jalanan di Surabaya mengalami penurunan yang cukup banyak. Berdasarkan penelitian (Setyorini et al., 2018), sajian data dinas sosial kota Surabaya pada tahun 2009 diketahui jumlah anak jalanan sebanyak 285 anak, dan menurun setiap tahunnya hingga pada tahun 2013 jumlahnya menjadi 94 anak jalanan. Sedangkan pada tahun 2018 hingga sekarang, jumlah anak jalanan stabil pada angka 50 hingga 56 anak jalanan. Berdasarkan data yang disebutkan peran program Kampung Anak Negeri cukup tinggi pada keadaan anak jalanan di Kota Surabaya. Melalui program ini sampai sekarang UPTD Kampung Anak Negeri telah meluluskan banyak anak binaan yang sudah dapat hidup mandiri dan memperoleh pekerjaan serta bekal pelatihan yang telah didapatkan berupa bekal pendidikan dan pengalaman selama tinggal di Kampung Anak Negeri meskipun dalam implementasinya masih banyak ditemui kendala dalam implementasinya masih banyak ditemui kendala diantaranya yaitu terkait minimnya daya tampung di UPTD Kampung Anak Negeri.

Berdasarkan informasi data sajian BPS Jawa Timur tahun 2019, jumlah anak jalanan dan PMKS anak-anak dikota Surabaya saat ini sebanyak 6.682 (enam ribu enam ratus delapan puluh dua) anak. Jika ditotal UPTD Kampung Anak Negeri hanya mampu menampung sekitar 2,33% dari keseluruhan jumlah Anak jalanan dan anak yang memiliki masalah sosial di Kota Surabaya. Dengan persentase tersebut, maka masih ditemukannya masalah implementasi untuk menangani anak jalanan oleh karena itu Pemerintah kota Surabaya melalui rumah binaan UPTD Kampung Anak Negeri dalam rangka membangun daerah kota Surabaya. Kemudian tantangan bagi Program Kampung Anak Negeri yang berfokus dalam pengembangan lingkungan sedang mengalami infrastruktur dan lingkungan yang kurang terawat sehingga perlu adanya perbaikan. Penulis juga berkunjung ke UPTD Kampung Anak Negeri nampak Dari luar UPTD nampak sepi dan masih kurang strategi untuk masalah tempat dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat banyak karena bersebelahan dengan kantor-kantor dan salah satu sekolah tinggi di Surabaya.

Semua anak jalanan yang bertinggal akan mendapatkan pelayanan dan pendampingan oleh petugas atau pengurus UPTD Kampung Anak Negeri. Dalam melakukan kegiatan pelatihan, anak binaan didampingi oleh beberapa pembina sesuai dengan bidang binaan masing-masing diantaranya pembina bakat dan minat, jasmani, mental, spiritual dan beberapa pembina lainnya. Keberadaan pembina juga bertugas menggantikan peran orangtua selama tinggal di Rumah binaan. Melalui pendamping, pihak UPTD dapat mengetahui seluruh kebutuhan sehari-hari anak binaan termasuk keperluan makan, sekolah, kesehatan dan

keperluan lainnya. Sejalan dengan jumlah anak binaan di UPTD Kampung Anak Negeri yang sudah mencapai batas maksimum daya tampung yakni 35 anak, maka tugas seorang pembina pun dinilai lebih berat.

Berdasarkan data yang didapat melalui penelitian yang dilakukan oleh (Danis et al., 2020) diketahui bahwa saat ini pendamping anak binaan di UPTD Kampung Anak negeri hanya berjumlah 4 orang saja. Dari keempat pendamping inipun nantinya masih dilakukan pembagian berdasarkan sif kerja yang tiap harinya terdiri dari 3 sif. Artinya setiap sifnya terdiri dari 8 jam kerja. Sehingga 35 anak binaan di UPTD Kampung Anak Negeri hanya didampingi oleh satu sampai dua pendamping saja di setiap sifnya. Jumlah ini tentu dapat dikatakan sangat minim dan kurang efektif terhadap kegiatan pengawasan bagi anak binaan. Minimnya jumlah pendamping memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pola asuh anak binaan sehingga menimbulkan beberapa pelanggaran yang masih sering dilakukan oleh anak Binaan selama tinggal di UPTD Kampung Anak Negeri. Jika dikaitkan dengan teori keberhasilan implementasi menurut pendapat George C. Edward III dalam (Deddy Mulyadi, 2019) maka implementasi Program Kampung Anak Negeri dipengaruhi oleh empat variabel. Penelitian ini untuk memecahkan masalah bagaimana implementasi sebuah program rumah binaan bagi anak Jalanan dan anak terlantar agar bisa dibina melalui UPTD Kampung Anak Negeri. Berikut merupakan Tabel bentuk pelanggaran anak binaan UPTD Kampung Anak Negeri.

Table 1.3 Angka Pelanggaran di UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo

No.	Bentuk Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran/Bulan		
		Januari	Februari	Maret
1.	Kabur dari Panti	-	2	3
2.	Merokok	-	1	1
3.	Bertengkar	3	4	8
4.	Mencuri	1	1	1
5.	Pelanggaran	2	19	14

Sumber: (Silvia Ayu Ariyanti, 2019)

Karakteristik anak binaan yang cukup keras tentu memicu munculnya tindakan pelanggaran yang kerap terjadi karena memiliki latar belakang kehidupan yang beragam dan cenderung bebas. Selain itu pelanggaran ini seringkali dipicu oleh kurangnya pengawasan dari pendamping sehingga menimbulkan peluang bagi anak binaan melakukan pelanggaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pelaksanaan Program Kampung Anak Negeri dengan judul “Implementasi Program Kampung Anak Negeri di Kota Surabaya” dengan studi kasus UPTD Kampung Anak Negeri yang dikelola Dinas Sosial kota Surabaya.

B. KAJIAN TEORITIS

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik adalah (1) kecerdasan; Kompetensi; Kebijakan; (2) seperangkat konsep dan prinsip yang memberikan garis dan landasan bagi suatu rencana dalam pelaksanaan kerja, kepemimpinan dan praktik (terkait dengan manajemen, organisasi, dll); gagasan, tujuan, prinsip atau maksud untuk memandu manajemen dalam upaya mencapai tujuan; praktik Meskipun penontonnya adalah orang banyak (publik); semua orang datang (tampilan, kunjungan, dll.). Kata politik berasal dari kata latin politea yang berarti kewarganegaraan. Karena politik mengacu pada pemerintah, maka akan lebih tepat untuk menerjemahkannya sebagai "politik" daripada "politik".

Tentang politik: Anderson dalam Agustino (2012:7) Mendefinisikan kebijakan sebagai berikut:

Serangkaian kegiatan dengan maksud/tujuan tertentu yang dikejar dan dilakukan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku dalam kaitannya dengan suatu masalah atau perhatian. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Ini membedakan kebijakan dari keputusan, yang merupakan pilihan antara beberapa alternatif.

Robert Eyestone dalam Agustino (2012:8) mendefinisikan ketertiban umum sebagai "hubungan antara unit administrasi dan lingkungannya". Dari sudut pandang mereka, Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt mendefinisikan ketertiban umum sebagai berikut:

“keputusan tegas yang ditandai dengan konsistensi dan pengulangan dalam perilaku pembuat keputusan dan mereka yang mengikuti keputusan tersebut.”

Pewarna dalam Agustino (2012:8) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah”. Definisi ini memungkinkan kita untuk memahami apa yang dilakukan pemerintah dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Berbeda dengan Richard Rose dalam Agustino (2012:7) juga mencoba mendefinisikan kebijakan publik sebagai “rangkaiannya panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan mempunyai konsekuensi bagi mereka yang terlibat dalam bentuk berbagai keputusan”. Rose membawa kita pada poin yang berguna bahwa kebijakan publik merupakan bagian dari sebuah mozaik, atau pola tindakan, dan bukan hanya satu tindakan dalam pola pengaturan.

Definisi lain dari kebijakan publik diberikan oleh Carl Friedrich dalam buku Agustino (2012:7), yang menyatakan bahwa kebijakan adalah “sekumpulan tindakan/inisiatif yang diajukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang mengandung hambatan (kesulitan) dan peluang (opportunities), sehingga kebijakan yang diusulkan itu menjadi berguna. mencapai tujuan yang ditetapkan.” Untuk tujuan politik sebagai bagian dari tindakan, Frederick menambahkan premisnya bahwa politik melibatkan pencapaian berbagai tujuan atau sasaran. Meskipun tidak selalu mudah untuk membedakan maksud atau tujuan tindakan pemerintah, pengertian bahwa politik melibatkan

perilaku yang disengaja adalah sebuah bagian penting dari pendefinisian kebijakan. Namun, kebijakan harus menunjukkan apa yang sebenarnya telah dilakukan dan bukan tindakan yang diusulkan untuk memecahkan masalah. Kebijakan publik adalah keputusan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Oleh karena itu, ciri kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik dirumuskan menurut apa yang David Easton dalam bukunya Agustino (2012:8) sebagai “otoritas” dalam suatu sistem politik, yaitu:

“Sesebuah, kepala pemimpin, manajer, legislator, hakim, administrator, konsultan, raja, dll. Easton mengatakan bahwa mereka yang memiliki kekuasaan dalam sistem politik yang berkaitan dengan perumusan kebijakan publik adalah:

Orang yang terlibat dalam urusan sehari-hari sistem politik dan memiliki tanggung jawab dalam masalah tertentu, di mana pada suatu saat mereka akan diminta untuk membuat keputusan di kemudian hari yang diterima dan mengikat oleh masyarakat arus utama. waktu spesifik Berdasarkan pengertian dari kebijakan umum yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Pemerintah menentukan kebijakan publik berupa sumber daya negara, Kebijakan umum melakukan atau tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu, Tujuan ketertiban umum adalah kepentingan umum.

Secara umum, istilah pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Riset implementasi adalah riset tentang riset kebijakan yang mengarah pada proses implementasi kebijakan. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan proses yang begitu kompleks sehingga seringkali bermuatan politis karena tidak adanya perbedaan kepentingan.

Untuk mengilustrasikan kompleksitas proses implementasi tersebut, dapat dilihat pada pernyataan ahli riset politik Eugene Bardach dalam buku Agustino (2012:138), yaitu:

“Cukup membuat program dan kebijakan umum yang terlihat bagus di atas kertas. Bahkan lebih sulit untuk mengartikulasikannya dengan kata-kata dan slogan yang terdengar menyenangkan di telinga para pemimpin dan konstituen yang mendengarkannya. Dan banyak lagi.” Sulit untuk melakukannya dengan cara yang membuat semua orang puas, bahkan jika mereka menampilkan diri kepada pelanggan.”

Dalam penelitian lain, Daniel Mazmian dan Paul Sabatier, dalam bukunya *Implementation and Public Policy* (Agustino, 2012:139) mendefinisikan penerapan pedoman sebagai berikut:

“Pelaksanaan keputusan-keputusan politik yang mendasar, sebagian besar berbentuk undang-undang, tetapi dapat juga berbentuk peraturan atau keputusan-keputusan penting eksekutif atau yudikatif.” Biasanya, sebuah keputusan mengidentifikasi masalah yang harus dipecahkan, menyatakan dengan jelas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menyusun atau mengelola proses implementasi.” Sementara itu, Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2012: 139) mendefinisikan penerapan pedoman sebagai berikut:

"Baik tindakan individu atau pejabat, atau pemerintah atau kelompok swasta, ditujukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan politik."

Dari ketiga definisi di atas, jelaslah bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: (1) ada tujuan atau sasaran politik; (2) ada kegiatan atau kegiatan untuk mencapai tujuan; dan (3) hasil operasi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses dinamis dimana para pelaksana politik melakukan satu atau lebih kegiatan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya memperoleh suatu hasil yang sejalan dengan maksud atau tujuan dari kebijakan itu sendiri. Hal ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Lester dan Stewart Jr. (Agustino, 2012: 139) yang menyatakan bahwa implementasi adalah proses dan hasil. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat melalui proses pencapaian hasil akhir (output), yaitu: apakah tujuan yang dapat dicapai tercapai atau tidak. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan Merrile Grindle (Agustino, 2012: 139) sebagai berikut:

“Ukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat pada proses mempertanyakan apakah implementasi program sesuai dengan yang ditetapkan, yaitu perlu diperhatikan bahwa implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam keseluruhan struktur politik, karena melalui proses ini tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dapat mempengaruhi proses politik secara umum.

Hal ini dibenarkan oleh Chief J.O. Udoji (1981) yang mengatakan:

“Implementasi kebijakan itu penting, bahkan mungkin lebih penting daripada pengambilan keputusan. Kebijakan hanyalah mimpi atau rencana baik yang tersimpan rapi di arsip jika tidak dilaksanakan.”

Teori implementasi kebijakan publik yang penulis gunakan untuk menganalisa program Kampung Anak Negeri untuk anak jalanan yang bertempat di UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo adalah Teori Edward III. Teori tersebut memiliki 4 indikator yang meliputi Sumberdaya, Disposisi, komunikasi, Struktur Birokrasi.

Sumber Daya adalah indikator yang menentukan suatu keberhasilan implementasi program, Kondisi kinerja yang baik maupun yang buruk secara langsung berdampak untuk Kompetensi dan kapabilitas dari sumberdaya-sumberdaya yang lain.

Disposisi adalah indikator yang berpengaruh penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan, sehingga dalam praktiknya tidak menjadi bias.

Komunikasi adalah indikator yang diperlukan agar para pembuat keputusan para implementor semakin konsisten dengan tujuan bersama karena kendali koordinasi yang baik akan menciptakan bentuk komunikasi tepat, akurat, dan konsisten.

Struktur birokrasi adalah indikator yang mengatur kinerja suatu organisasi ke arah yang lebih baik, membentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali fakta tentang implementasi program Kampung Anak Negeri yang dikhususkan untuk anak jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo. pengembangan kota Surabaya sebagai Kota Layak Anak (KLA) yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk mengurangi jumlah angka anak jalanan yang meningkat. Melihat aset dan potensi yang ada, Dinas Sosial membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah ini memiliki potensi yang cukup besar dan sudah menampung 32 anak, namun masih ada akses daya tampung yang seharusnya tersedia adalah 51 anak, sarana prasarana dan fasilitas yang perlu perhatian lebih mendalam. Maka dari itu perlu adanya rencana strategis untuk menerapkan program ini. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan, menguraikan, menginterpretasikan permasalahan serta kemudian mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut, yaitu melalui pengumpulan data dan informasi, dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur dan wawancara dengan masyarakat setempat, pengunjung, dan instansi terkait. Teori yang dipakai untuk menganalisa adalah teori Edward III yang memiliki 4 indikator meliputi Komunikasi, Disposisi, Sumberdaya, Struktur birokrasi.

D. PEMBAHASAN

Strategi Pengembangan Pariwisata

Dari penyajian data yang dibahas mengenai implementasi program Kampung Anak Negeri berikut adalah pembahasan mengenai implementasi keberhasilan program dalam pembahasan ini penulis akan menjawab rumusan masalah yang pertama pertanyaan pelaksanaan program Kampung Anak Negeri Wonorejo yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Surabaya yaitu Pelaksanaan yang dilakukan dengan 4 variabel menurut teori Edward III untuk mengukur keberhasilan program yang dikhususkan menampung anak jalanan berikut ini adalah variabel komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Komunikasi adalah Bentuk pelaksanaan komunikasi yang diciptakan untuk memberdayakan hidup anak Jalanan pemerintah kota Surabaya menurunkan perintah kepada Dinas Sosial untuk membuat 3 UPTD, yaitu UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan (ABK), Kampung Anak Negeri Wonorejo (Anak Jalanan), Panti Griya Werdha (Panti Jompo). Salah satu target penulis mengenai objek penelitian di Kampung Anak Negeri Wonorejo (Anak Jalanan) yang membentuk sistem komunikasi yang baik dengan pihak Liponsos Keputih bersama Satpol PP untuk menyaring anak jalanan melalui pemilihan terlebih dahulu. Setelah dilakukan komunikasi bersama-sama kemudian anak jalanan yang terpilih bisa dikirimkan ke UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo (Anak Jalanan).

Sumberdaya adalah Kompetensi pegawai untuk melaksanakan program mengurangi angka anak jalanan di Kota Surabaya diwajibkan memiliki karakteristik yang baik, peduli, ramah, dan disiplin serta mampu memberikan variasi untuk mendidik lewat pembinaan dan pendampingan, membentuk karakter anak jalanan dengan latar belakang & temuan masalah yang berbeda. Karena itu, banyak dari para petugas pembina dan pendamping memiliki jiwa dan hati yang besar untuk sukarela merawat dan mengalihkan sudut pandang anak jalanan yang dibina untuk layak hidup.

Disposisi dan sikap adalah sikap kota Surabaya untuk menciptakan Kota Layak Anak (KLA) sudah dibuktikan dengan Dinas Sosial kota Surabaya yang membuat 3 UPTD. Sikap salah satu UPTD yang hendak diteliti yaitu UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo yang memberikan sikap cinta dan peduli kepada anak jalanan dengan membentuk rumah binaan, didalam rumah ini juga telah menciptakan jadwal, peraturan, janji Kampung Anak Negeri. Keseluruhannya membentuk secara langsung sikap lingkungan staff dan anak jalanan lebih baik.

Struktur birokrasi adalah struktur UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo dibentuk sesuai urutan jabatan dan tugas, pokok, fungsi. Semuanya “Untuk pembagian kerja sudah optimal, untuk pembantuan serta perbaikan berupa evaluasi rapat kerja, ditetapkannya karakter pendampingan dan pembinaan kampung anak negeri Wonorejo tidak bisa disamakan. Dan diketahui juga kantor UPTD telah terbagi 3 kantor. Kantor-kantornya adalah UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo (Anak Jalanan), UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan (ABK), Panti Griya Werdha (Panti Jompo Permasalahan di UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo juga tidak bisa dianggap selalu stabil namun statis, kenakalan anak binaan). yang umumnya terjadi seperti mudah menciptakan kerusuhan di rumah binaan, bertengkar, memecah kaca, membolos sekolah, dan kabur maupun bersembunyi”.menjalankan tugas agar lebih baik dan tidak adanya pelanggaran yang terjadi. Perbedaan suara pendapat antara staf memang biasa terjadi. Karena dari para petugas pembina dan pendamping pasti akan diberikan titipan anak yang akan dibina. Pembinaan dan pendampingan setiap para staff dengan cara didikan yang berbeda-beda.

Pembahasan dampak yang dihasilkan dari program Kampung Anak Negeri berbasis rumah binaan UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Surabaya adalah Dampak yang dihasilkan dari program Kampung Anak Negeri Wonorejo mampu mengurangi angka anak jalanan dengan mengambil mereka di jalanan kemudian memberikan sosialisasi dengan mengajak mereka untuk ditampung di UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo. Kasus kekerasan yang terjadi dikota Surabaya yang melahirkan anak terlantar berjumlah 6.349 anak dan 59 anak. Dengan jumlah sebanyak itu UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo juga mampu menampung sebanyak 51 anak masih terisi 32 anak. Sosialisasi melalui e-surat kepada kelurahan se-kota Surabaya juga memudahkan bagi mereka di kampungnya yang ditemukan anak terlantar, maupun orang yang lanjut usia dapat merujuk dirinya melalui RT/RW setempat. Berikut ini adalah gambaran umum kegiatan pembinaan maupun pendampingan dan fasilitas yang ada di UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo yang cukup

membuktikan keberhasilan implementasi Kampung Anak Negeri Wonorejo.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Dari teori George C Edward III dapat disebut dengan teori implementasi keberhasilan. Dalam Pendekatan yang diterjemahkan oleh Edward III terdapat empat aspek yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Maka dapat dinyatakan bahwa dari keempat aspek tersebut dikatakan sangat baik dalam mengimplementasikan program kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di tempat UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo mengenai implementasi program Kampung Anak Wonorejo, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program yang dikhususkan untuk Anak Jalanan berjalan dengan baik. Sehingga dapat dilihat dari beberapa kendala yang terjadi. Jika dilihat dari (1) Komunikasi, semua staff yang berada di dalam satuan kerja saling berkoordinasi dan berkomunikasi dengan para anak jalanan untuk membina mereka dengan pembinaan kognitif dan pembinaan minat bakat. (2) Sumber Daya, Sumber Kompetensi para staff yang mengabdikan dirinya untuk mengikuti dan memberi bekal pengetahuan serta mendidik anak jalanan untuk peningkatan daya hidup. Serta sumberdaya seperti sarana dan prasarana yang tetap terjaga bersih dan berkualitas. Untuk Sumberdaya anak jalanan yang ditampung masih sebanyak 32 anak sedangkan masih banyak daya tampung siswa yang dapat termuat yaitu 52 anak. (3) Disposisi atau sikap, sikap pemerintah yang senantiasa mengawasi kinerja Dinas Sosial untuk membantu pengurangan anak jalanan melalui UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo melalui e-surat, bersurat kepada RT/RW melalui informasi kelurahan. Serta pembuatan peraturan dan tatacara untuk beradaptasi bagi anak jalanan di lingkungan rumah binaan sudah disikapi bersama-sama dan sudah disepakati akan resiko atau sanksi yang didapatkan jika peraturan dilanggar. (4) Struktur birokrasi, tatanan organisasi yang telah tertata menjadi satuan kerja yang baik dan senantiasa mengoptimalkan anak binaan untuk aktif dan semangat melaksanakan jadwal harian agar pembangunan karakter juga bisa diterapkan seperti kedisiplinan, kemandirian, kebersihan, dan keindahan lingkungan sekitar. Satuan rapat kerja juga dituntut untuk menciptakan suasana lingkungan kerja yang nyaman bagi para anak jalanan untuk mudah beradaptasi dengan kebiasaan kegiatan di rumah binaan.

Selain itu, dampak adanya program Kampung Anak Negeri Wonorejo yang dikhususkan untuk menampung Anak Jalanan dan anak terlantar di Kota Surabaya mampu menjalankan program pembinaan dan pendampingan dengan terencana sesuai jadwal kegiatan yang disertai juga dengan keseimbangan pembinaan minat bakat. Hambatan yang masih sering ditemukan adalah masalah pertengkaran, ketidaksiplinan saat mendapatkan perintah untuk berangkat sekolah, keterlamabatan kognitif para anak jalanan yang dibina seperti lambat membaca, menulis, berhitung, kecuali mengaji yang didampingi dengan pembina. Selain itu juga mengenai komunikasi untuk membuat pelatihan bagi para staf yang seharusnya diadakan namun belum bisa terlaksana karena koordinasi dengan baik oleh Dinas Sosial. Penyebab kurangnya pantauan Anak Jalanan di Jalan Kota

Surabaya membuat Dinas Sosial Surabaya membentuk sebuah 3 kantor UPTD. Mengenai Sumberdaya yang berhubungan dengan keberhasilan kompetensi para staff berdasarkan seleksi kepegawaian untuk memenuhi kriteria menyayangi anak, peduli terhadap anak, dan mampu membentuk karakter anak menjadi lebih baik.

Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan penulis berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

- a. Untuk menunjang pengembangan program yang diimplementasikan untuk membina anak jalanan sebaiknya para staff juga diberikan suatu program bentuk pelatihan yang bisa membuat para staff progresif.
- b. Sarana dan fasilitas pariwisata seperti Ruang perwatan seragam sekolah, Asrama, permakanan, mushola, ruangan minat bakat dan kamar mandi terkait lainnya perlu ditingkatkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan baik kepada wisatawan maupun masyarakat sekitar.
- c. Rangkaian kegiatan minat bakat yang dilakukan oleh para pelatih tidak ditemukannya begitu aktif disamping itu banyak partisipasi dari mahasiswa yang mengadakan bakti sosial serta memberikan pengetahuan yang positif anatar sesama anak jalanan maupun staff pendamping dan staff pembina.
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kunjungan ke kampung yang banyak mendapatkan kategori Keluarga Miskin agar anak yang terlantar juga dapat ditampung dan dibina maupun juga para lansia yang bisa ditampung di salah satu kerabat dari UPTD ini yaitu Panti Griya Werdha.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, S. (2018). *Street Children and its Impacts on Society*. 2(4), 12–22.
- Cahyadi, B. B. N., Puspitasari, N. Z., Britania, D. A., & Wahyudi, K. E. (2021). Efektivitas Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(5), 731–742. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i5.153>
- Danis, M., Wati, M., & Qomaruddin, M. B. (2020). *Analisis Kepatuhan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok Pada Anak Asuh UPTD Kampung Anak Negeri Analysis of Compliance with Non-Smoking Area Regulations in Foster Care of Regional Technical Implementation Unit of Kampung Anak Negeri*. 8(1), 99–110. <https://doi.org/10.20473/jpk.V8.I1.2020>.
- Deddy Mulyadi. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BANDUNG. XVI(1), 66–80.
- Engkus. (2019). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan di Kota Bandung. *Bina Ilmiah*, 561(3), 2077–2081.
- Kurnianingsih, M., Fitriaciada, A., Dimiyati, K., Wardiono, K., & Nurrachman, A. D. (2022). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Criminal Victimization : Women and Fintech Financing from the Theory of Lifestyle Exposure*. 157–165.

- Kertati, I. (2018). Deformasi Kebijakan Penangan Anak Jalanan Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 12(1), 129–142.
- Millenia Prihatini. (2019). *Komunikasi interpersonal da'i pendamping anak jalanan di rumah singgah salvatore surabaya*. 30, 183–200.
<https://doi.org/10.24014/jdr.v30i2.8500>
- Setyorini, D. C., Sosiologi, P., & Sosial, R. (2018). BENTUK INTERAKSI SOSIAL PEGAWAI REHABILITASI SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DINAS SOSIAL SURABAYA. *Paradigma*, 06.
- Street, M. (2021). Theorising child well-being: Towards a framework for analysing Early Childhood Education policy in England. *Journal of Early Childhood Research*, 19(2), 211–224.
<https://doi.org/10.1177/1476718X20969841>
- Silvia Ayu Ariyanti. (2019). *EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN ANAK PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KAMPUNG ANAK NEGERI DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA Silvia Ayu Ariyanti Abstrak.*